

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kota Semarang sebagai ibu kotanya berlokasi di persimpangan Jalan Pulau Jawa Utara yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kota Jakarta. Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak (bagian timur), Kabupaten Semarang (bagian selatan), Kabupaten Kendal (bagian barat), dan Laut Jawa (bagian utara).

Luas wilayah ibu kota ini sebesar sebesar $373,78\text{km}^2$ (BPS, Kota Semarang tahun 2023) dan ketinggian berada pada berada 348.000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan pembagiannya, sebesar $37,90\text{km}^2$ atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan $335,81\text{km}^2$ atau sebesar 89,96% bukan lahan sawah. Dari luas wilayah tersebut Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah paling luas berada di Kecamatan Gunungpati Menurut data BPS Kota Semarang (2023), Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas sedangkan dengan luas wilayah terkecil ditempati oleh Kecamatan Semarang Tengah.

Tabel 2. 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1.	Mijen	56,52	15,12
2.	Gunungpati	58,27	15,59
3.	Banyumanik	29,74	7,96
4.	Gajah Mungkur	9,34	2,50
5.	Semarang Selatan	5,95	1,59
6.	Candisari	6,40	1,71
7.	Tembalang	39,47	10,56
8.	Pedurungan	21,11	5,65
9.	Genuk	25,98	6,95
10.	Gayamsari	6,22	1,66
11.	Semarang Timur	5,42	1,45
12.	Semarang Utara	11,39	3,05
13.	Semarang Tengah	5,17	1,38
14.	Semarang Barat	21,68	5,80
15.	Tugu	28,13	7,52
16.	Ngaliyan	42,99	11,50
	Kota Semarang	373,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2023

2.1.2 Kependudukan Kota Semarang

Menurut Proyeksi penduduk dalam dokumen Kota Semarang di angka 2023, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 1.659.975 jiwa. Jika dibandingkan dengan data pada tahun 2021 yang mencatat jumlah penduduk sebanyak 1.656.564 jiwa, jumlah penduduk mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yaitu

mencapai 4.441 jiwa/ km^2 . Mengacu pada RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, Kota Semarang memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Namun, distribusi penduduk di setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai wilayah terpadat dengan 12.067 penduduk per km^2 , sebaliknya wilayah yang kepadatannya paling rendah, yaitu Kecamatan Tugu.

Tabel 2. 2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Peduduk per km^2
1.	Mijen	85.818	1.518,28
2.	Gunungpati	98.674	1.693,34
3.	Banyumanik	141.319	4.751,45
4.	Gajah Mungkur	55.490	5.938,69
5.	Semarang Selatan	61.212	10.294,11
6.	Candisari	74.461	11.639,84
7.	Tembalang	193.480	4.902, 02
8.	Pedurungan	193,125	9.148,66
9.	Genuk	128.696	4.953,84
10.	Gayamsari	69.334	11.147,11
11.	Semarang Timur	65.427	12.067,24
12.	Semarang Utara	116.054	10.186,71
13.	Semarang Tengah	54.338	10.502,98
14.	Semarang Barat	146.915	6.777,58
15.	Tugu	33.079	1.176,14
16.	Ngaliyan	142.553	3.316,14
	Kota Semarang	1.659.975	4.441,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2023

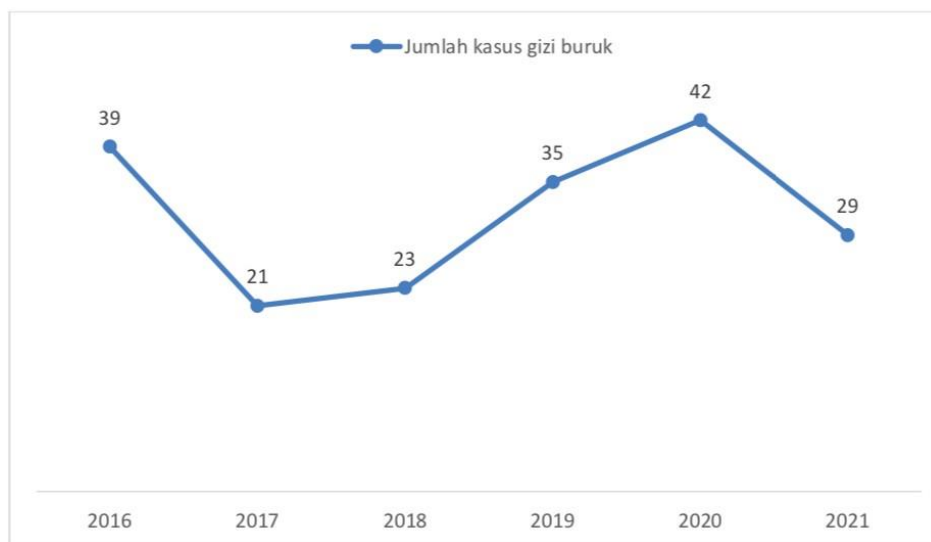
2.1.3 Kondisi Kesehatan Kota Semarang

Status gizi anak di bawah 5 tahun (Balita) memiliki peranan signifikan sebagai indikator kesehatan yang kritis. Hal itu karena di usia

tersebut anak rentan terhadap masalah gizi dan penyakit. Pemantauan status gizi pada kelompok usia ini menjadi hal prioritas untuk menjaga pertumbuhan optimal. *Stunting* ditandai dengan balita yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur mereka akibat gagalnya pertumbuhan karena kekurangan gizi kronis secara berkelanjutan.

Guna menetapkan prevalensi gizi di Kota Semarang, dilakukan survei operasi timbang pada bulan Agustus 2021. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dari total 44.058 balita yang ditimbang, terdapat prevalensi stunting sebesar 3,10%, yang setara dengan 1.367 balita (Dinkes.semarangkota.go.id).

Gambar 2. 1
Grafik Tren Kasus Gizi Buruk Kota Semarang 2016—2021



Sumber: Seksi PMG, Bidang Kesehatan Masyarakat 2022.

Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 29 kasus yang menyangkut gizi buruk. Perawatan gizi yang buruk secara menyeluruh melibatkan pengukuran antropometri dan penentuan status gizi,

pemeriksaan laboratorium dan rontgen, konsultasi dengan dokter, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pelayanan fisioterapi, sesi konseling gizi, pemberian Program Manajemen Terapeutik (PMT), dan paket F100 selama minimal 6 bulan, pemberian vitamin, penyuluhan, serta pendampingan oleh tenaga Kesehatan dan kader.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Semarang

PDRB merupakan dasar kondisi perekonomian di Kota Semarang atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 227.619.168, 05 dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 152.999.373, 96. Perekonomian Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2022, sebesar 5,73%. Pertumbuhan tertinggi dari segi produksi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai persentase sebesar 79,01%. Sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang tahun 2022.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan pelayanan kesehatan memiliki visi yaitu Terciptanya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berdasarkan Pancasila dan NKRI yang Ber- Bhineka Tunggal Ika. Adapun misi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang andal dan produktif dengan tujuan terciptanya pemerataan yang adil dan ketentraman.
- 2) Menumbuhkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan sektor industri yang berdasar pada riset dan inovasi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- 3) Menyediakan jaminan bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah, memenuhi dan mempertahankan hak dasar, dan menghormati hak asasi manusia secara adil.
- 4) Realisasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan guna mendukung perkembangan kota.
- 5) Proaktif melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun tugas dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dijabarkan sebagai berikut:

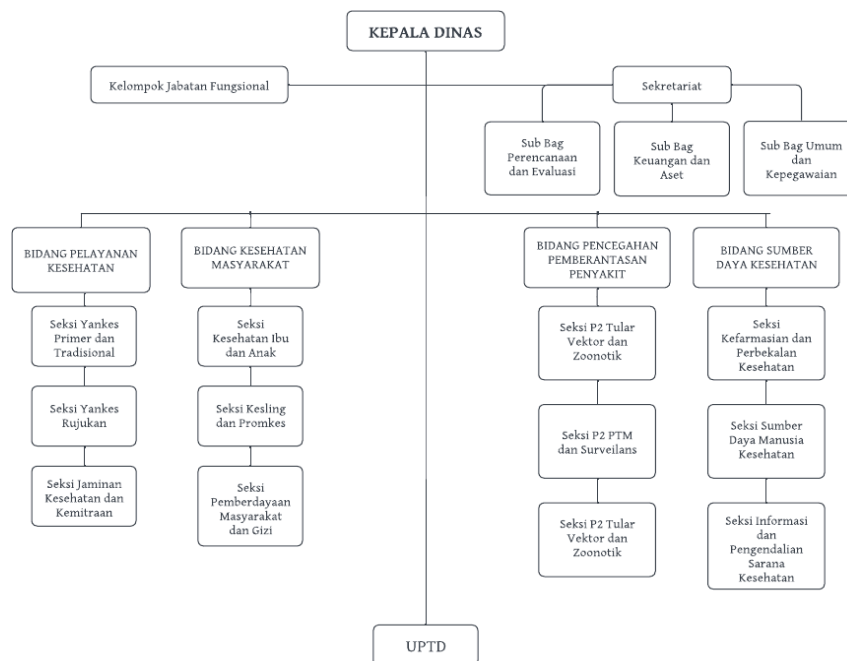
- 1) Membuat kebijakan pelaksanaan dan pengendalian teknis di sektor kesehatan.

- 2) Melaksanakan pembinaan umum di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, termasuk peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).
- 3) Pengelolaan operasional dan administrasi, mencakup pemberian rekomendasi dan izin yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- 4) Pengawasan teknis dalam upaya pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 5) Menetapkan angka kredit bagi petugas kesehatan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang



Sumber: Data Dinas kesehatan yang dimodifikasi penulis, 2023

2.2.4 Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tanggung jawab atas penyusunan dan penerapan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga. Begitupula dengan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Semarang terbagi atas 3 seksi yaitu: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; Seksi Kesling dan Promkes; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi. Bidang ini memiliki tugas untuk membantu kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesehatan keluarga, gizi

masyarakat dan gizi keluarga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, fungsi dari Bidang Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Persiapan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- 2) Persiapan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Persiapan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Bandarharjo

2.3.1 Visi dan Misi Kelurahan Bandarharjo

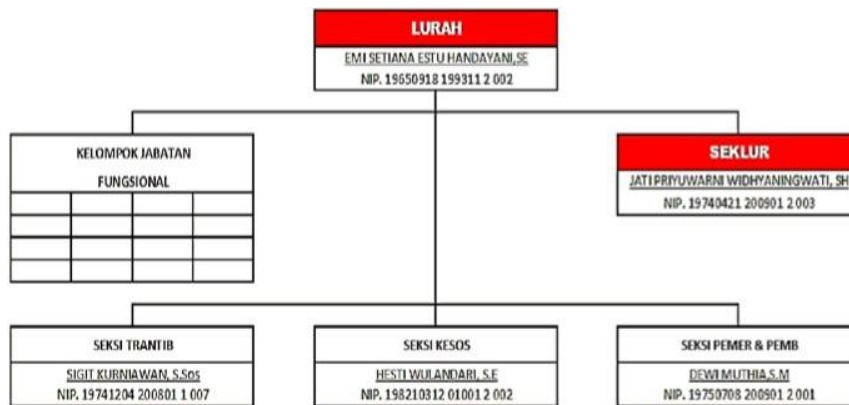
Kelurahan Bandarharjo dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan pelayanan memiliki visi, yaitu Mewujudkan Pelayanan yang Optimal di Lingkungan Masyarakat Melalui Program Semarang Hebat Demi Tercapainya Kesejahteraan dan Keadilan. Adapun misi dari Kelurahan Bandarharjo yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Adanya kegiatan dalam memberdayakan tenaga pekerja Kelurahan.
- 2) Dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan kolaborasi antara lembaga masyarakat dan instansi.

- 3) Menciptakan partisipasi masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dengan mengembangkan UKM untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- 4) Aturan dan norma tetap dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pemberian layanan kepada masyarakat bersikap demokratis dan adil.
- 6) Menerapkan konsep 3S (Senyum, Salam dan Sapa)

2.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Kelurahan Bandarharjo



Sumber: Bandarharjo.semarangkota.go.id, 2021

2.3.3 Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Bandarharjo

Berada di bagian utara Kota Semarang, Kelurahan Bandarharjo memiliki luas wilayah mencapai 342,68 km^2 . Dari Kecamatan, jarak Kelurahan Bandarharjo sekitar 1,5 km dan berjarak 0,6 km dari Pemerintahan Kota Semarang. Kelurahan Bandarharjo memiliki batasan wilayah yang dijabarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kali Semarang dan Kelurahan Kuningan
- Sebelah Selatan : Kali Semarang dan Kelurahan Dadapsari

Sebelah Timur : Jalan Empu Tantular dan Kelurahan Tanjungmas

Gambar 2. 4
Peta Wilayah Kelurahan Bandarharjo



Sumber: Bandarharjo.semarangkota.go.id, 2021

Berdasarkan data geografis dan penduduk, Kelurahan Bandarharjo terbagi menjadi 12 RW dan 103 RT dengan penduduk paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh. Menurut monografi, jumlah penduduk di Kelurahan Bandarharjo sebanyak 22.914 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 11.427 dan perempuan berjumlah 11487. Dapat dilihat dari data monografi Kelurahan Bandarharjo tahun 2022, mayoritas pendidikan masyarakat adalah SLTA/SMA/Sederajat sebanyak 4776. Adapun sarana dan prasarana di Kelurahan Bandarharjo terdiri dari:

- 1) Prasarana Pendidikan

- a. PAUD = 6 buah
- b. TK = 6 buah
- c. SD = 2 buah
- d. SD Swasta Umum = 3 buah
- e. SD Muhammadiyah = 2 buah
- f. MI = 1 buah
- g. SMP = 1 buah

2) Prasarana Kesehatan

- a. Puskesmas = 1 buah
- b. Posyandu = 14 buah

3) Prasarana Ibadah

- a. Masjid = 7 buah
- b. Mushola = 32 buah
- c. Gereja = 2 buah

2.4 *Stunting*

Stunting dapat diketahui sebagai kondisi balita yang memiliki tinggi badan tidak pada ukurannya berdasarkan dengan umurnya akibat kekurangan gizi kronis secara terus menerus sampai 1.000 HPK. Penyebab balita stunting karena permasalahan gizi akibat faktor lingkungan (air dan sanitasi), keadaan sosial dan ekonomi menengah ke bawah, serta tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada ibu hamil. Balita yang *stunting* mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif sehingga mempengaruhi kemampuan mereka secara optimal di masa depan.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan intervensi gizi yang merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting ditingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan intervensi terbagi menjadi dua, intervensi gizi spesifik fokus terhadap penyebab langsung berkaitan dengan sektor kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif fokus terhadap penyebab di luar sektor kesehatan yang berkaitan dengan pangan, edukasi pola asuh, tersedianya air dan sanitasi.

Tabel 2. 3
Intervensi Spesifik dan Sensitif Percepatan Penurunan Stunting

No	Jenis Intervensi Spesifik	Program/ Kegiatan Intervensi
1.	Intervensi pada ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan PMT • Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
2.	Intervensi sasaran ibu menyusuidan anak 0-6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi kekurangan iodium • Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil • Melindungi ibu hamil dari malaria • Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum) • Mending pemberian ASI Eksklusif
3.	Intervensi sasaran ibu menyusuidan anak usia 7-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI • Menyediakan obat cacing • Menyediakan suplementasi zink • Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan • Memberikan perlindungan terhadap malaria • Memberikan imunisasi lengkap • Melakukan pencegahan dan pengobatan diare

Sumber: PPN/ Bappenas, 2018

Tabel 2. 4
Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting

No	Jenis Intervensi	Program/ Kegiatan Intervensi
1.	Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum yang aman dan bersih • Akses sanitasi yang layak
2.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pelayanan Keluarga Berencana • Akses Jaminan Kesehatan • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin
3.	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran luasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan antarpribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak • Penyediaan konseling Kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.	Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses bantuan pangan nontunai untuk keluarga kurang mampu • Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, dan minyak goreng) • Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestasi • Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

Sumber: PPN/ Bappenas, 2018

Dari pemaparan tabel terkait kegiatan intervensi gizi dalam upaya penurunan *stunting* di atas, peneliti memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik melalui PMT. Pemilihan fokus tersebut berdasarkan pada permasalahan *stunting* yang terjadi di Bandarhajo paling besar berasal dari sektor kesehatan.